

PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN MARXIS-SOSIALIS

Oleh:

Afifuddin

Afifuddin@yahoo.com

Asbtract

Marxism-Socialism is a theory which is designed to build a good society. A society that negates the suppression of one class against another class, the widest possible freedom for every person to express his humanity in any production activity (economic) as the basis of human life. Marxism balked patterns of education that only prepares participants to be 'workers' who will be squeezed by the machinery of capitalist production. In view of Marxism, Practice, in the sense of direct relevance to the realities of human and material nature, is the criterion of truth, because it underlies the knowledge of reality and because of the outcome of cognitive processes is realized in the activity of the material, human objective. Practice is the sole criterion of objective truth, in so far as it represents not only mental human, but also human linkages that exist objectively with the natural and social world that surrounds him.

Keywords: Marxism, socialism, theory, knowledge.

A. Pendahuluan

Pendidikan, dalam cakupan luas, dipahami sebagai realitas sosial dan merupakan perwujudan dari salah satu unsur kebudayaan manusia. Sebagai realitas sosial yang menyertai perjalanan hidup manusia, pendidikan tentunya tidak luput dari dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dapat berperan sebagai subyek dari perubahan sosial, dalam arti bahwa pendidikan merupakan alat dan faktor pendorong penting dalam setiap perubahan sosial. Dan pada sisi lain, pendidikan juga seringkali menjadi obyek atau 'korban' dari perubahan dan perlakuan sosial politik yang dilakukan oleh pihak yang dominan.

Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis menyebabkan timbulnya perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikannya, yang kemudian menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi politik.¹ Pengertian lain disebutkan Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang memberi pengaruh

pada sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola peri-kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan struktur, sistem dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia, yang dipengaruhi oleh adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu sistem sudah tentu dalam perwujudannya, senantiasa mengalami perubahan yang dapat berupa kemajuan atau kemunduran, luas atau terbatas, cepat atau lambat.

Di antara faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dapat disebutkan antara lain: Pertama, adanya sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan di sekolah mengajarkan kepada setiap orang bermacam-macam ilmu pengetahuan untuk diketahui atau dikuasai. Karena itu pendidikan memberi suatu nilai tertentu bagi manusia dalam membuka pikirannya secara lebih rasional atau cara berpikir ilmiah. Pendidikan mengajarkan pada setiap orang agar dapat berpikir lebih obyektif terutama terhadap penilaian manfaat kebudayaan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, ketidapuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Keadaan seperti ini apabila terjadi dalam waktu yang lama, di mana masyarakat mengalami tekanan-tekanan dan kekecewaan yang dalam, sehingga mendorong timbulnya suatu revolusi dalam masyarakat. Dalam kerangka inilah pendidikan berperan penting dalam mengakomodasi upaya penyadaran, sosialisasi ide dan nilai serta mempersiapkan gerakan yang bertujuan mewujudkan suatu perubahan sosial.

Pola perubahan sosial ada dua macam, yaitu bersumber dari negara (*state*) dan dari bentuk pasar bebas (*free market*). Perubahan yang dikelola oleh pemerintah berorientasi pada ekonomi garis komando yang datang secara terpusat. Sedang yang berasal dari pasar bebas, campur tangan pemerintah sangat terbatas. Negara member pengaruhnya secara tidak langsung, sehingga pasar bebas lebih dominan. Perubahan sosial di Indonesia, sejauh ini menempuh kebijaksanaan pasar bebas, meski campur tangan pemerintah juga terbilang cukup kuat.³ Dengan demikian perubahan sosial yang akan terjadi di masa depan akan sangat tergantung pada 'kekuatan-kekuatan eksternal' yang berasal dari masyarakat industri internasional yang modalnya ada di Indonesia.

Kondisi ini pada kenyataannya berekses langsung pada dunia pendidikan di tanah air. Saat ini pendidikan di Indonesia cenderung terindustrialisasi dan menjadi 'alat'. Alat bagi bagi si anak untuk memperoleh pekerjaan, alat bagi guru untuk memperoleh penghasilan, alat bagi pengelola sekolah untuk memperoleh keuntungan. Singkatnya, lembaga sekolah tak lebih dari sekedar produk kapitalisme lanjut yang berorientasi pada kepentingan pasar.

Pendidikan seperti ini 'memaksa' guru, siswa, orang tua untuk ikut dalam arus kapitalisme. Akhirnya guru dituntut untuk mencetak siswa-siswa yang siap pakai di dunia industri. Pada dasarnya pendidikan yang diselenggarakan hanya semata-mata demi industri dan pasar akan mengalami marjinalisasi dan pengrusakan nilai hakiki.

Dengan kondisi demikian, pendidikan bisa kehilangan karakter moralitas dan spiritualnya, karena secara fungsional pendidikan dinilai harus memiliki relevansi pelipatgandaan dalam kegiatan produksi.

Marxisme, yang digagas oleh seorang tokoh besar yang cukup berpengaruh di dunia, Karl Marx, muncul sebagai refleksi dan kritik tajamnya terhadap perilaku-perilaku kapitalisme yang berimplikasi pada penindasan terhadap kelas 'bawah' oleh kelas 'atas' yang lebih dominan secara ekonomi dan politik, serta alienasi yang terjadi, baik pada kelompok pemilik kapital (modal) maupun kelompok buruh yang tersubordinasikan dalam jeratan industrialisasi. Dalam banyak hal, Karl Marx lebih dipersonifikasikan sebagai tokoh ekonomi-politik serta pejuang kaum buruh. Selama ini, kajian-kajian ilmiah hanya menyoroti teori "sejarah pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar" yang merupakan titik pijak pemikiran Marx.

Namun, dalam penilaian Nurani Soyomukti, Karl Marx bukan hanya pemikir ekonomi-politik, tapi juga seorang pemikir pendidikan kenamaan. Bahkan ia adalah pelopor dan peletak teori pendidikan kritis dan pembebasan, bukan Paulo Freire sebagaimana diyakini banyak kalangan.

B. Marx, Marxisme-Sosialisme dan Persoalan Pendidikan di Indonesia

Karl Marx lahir di Trier, distrik Moselle, Prussian Rhineland, Jerman, 5 Mei 1818. Ayahnya, seorang pengacara, menafkahi keluarganya dengan relatif baik, khas kehidupan kelas menengah. Orang tuanya adalah dari keluarga pendeta Yahudi (*rabbi*). Tetapi, karena alasan bisnis ayahnya menjadi penganut ajaran Luther ketika Karl Marx masih sangat muda. Tahun 1841 Marx menerima gelar doktor filsafat di Universitas Berlin, universitas yang sangat dipengaruhi oleh Hegel dan guru-guru muda penganut filsafat Hegel, tetapi berpikiran kritis.

Membicarakan Marx dalam konteks ke-Indonesiaan sesungguhnya masih menyisakan ironi yang sampai sekarang belum terselesaikan sejak Orde Baru menancapkan kekuasaannya. Pemberangusan ideologi Marx oleh pemerintah, selalu dikaitkan dengan keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pernah mencoba melakukan kudeta. Meskipun banyak sejarawan yang menilai pelarangan tersebut lebih bersifat politis, PKI dijadikan tumbal oleh kudeta Orde Baru terhadap Orde Lama, di bawah kendali Soeharto. Bahkan, ada yang menilainya sebagai sebuah pelanggaran HAM. Pelarangan terhadap suatu teori, paham, atau suatu pandangan itu sendiri juga menyulitkan bagi mereka yang memahami hak asasi manusia karena bagi mereka, pikiran dan keyakinan adalah hak asasi anugerah Tuhan yang tak boleh dipaksakan maupun dilarang. Apalagi dalam era kepesatan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, pelarangan suatu pikiran atau paham hanyalah menjadi lelucon belaka, karena teknologi membuat siapa saja yang dapat mengakses teknologi tersebut diuntungkan, karena dengan mudah dapat dapat mengakses apa saja, termasuk ajaran dan teori Karl Marx dengan mudah dan cepat.

Pelarangan Marx semakin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam membuka ruang dialektika dan diskursus sebagai sebuah proses ilmiah. Di satu sisi,

pelarangan hanya bersifat simbolik yang membungkus dominasi jargon politik, di sisi lain, adalah sebuah tindakan diskriminatif yang justru bertentangan dengan prinsip demokrasi sebagai ideologi negara.⁴ Dalam suasana keterbukaan politik dan demokratis yang semestinya juga merambah pada ranah dialog-dialog pemikiran dan filsafat, Marxisme atau Sosialisme sebagai hasil refleksi pada problematika sosial sudah saatnya ditempatkan sebagai sumbangan ide yang penting dan perlu dikritisi.

Seperti Fungsionalisme yang dikemukakan Durkheim, Marxisme adalah teori yang dirancang untuk mempromosikan masyarakat yang baik. Seperti fungsionalisme, teori ini adalah respon dan sekaligus bagian dari modernitas, yakni bagian dari keyakinan modern bahwa masyarakat dapat ditransformasi menjadi lebih baik, kemajuan yang dapat dicapai dalam organisasi sosial melalui penerapan pengetahuan manusia. Marxisme bersandar pada keyakinan bahwa potensi pencapaian dan kebebasan individu terikat pada potensi bagi kemajuan dalam organisasi sosial, yang berarti juga struktur masyarakat. Menurut Marx, potensi bagi pencapaian individu terkait dengan aktivitas ekonomi atau produksi dari suatu masyarakat. Khususnya, kesempatan untuk bebas dalam masyarakat modern hanya mungkin apabila sistem produksi berbasis kelas yang menjadi karakter kapitalisme dihapuskan.⁵

Sosialisme muncul sebagai paham ekonomi dan kemasyarakatan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa. Revolusi industri yang terjadi di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, kaum borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal bertumpun di tangan mereka. Sementara sebagian besar masyarakat kota hidup sebagai buruh yang tenaga kerjanya diperas dan semakin miskin.⁶ Kekayaan yang dihasilkan karena kerja keras kaum pekerja (*proletar*) ini hanya bisa dinikmati oleh kaum *borjuis* kapitalis yang jumlahnya tidak besar. Demikian dari waktu ke waktu kesenjangan sosial dan ekonomi semakin kentara.

Marxisme atau Sosialisme Marx pada mulanya merupakan sebuah aliran pemikiran ekonomi, namun kemudian disebabkan oleh tuntutan sejarah, berkembang menjadi aliran pemikiran kemasyarakatan dan ideologi politik yang revolusioner. Sebagai aliran pemikiran ekonomi, Marxisme menggariskan tatanan kehidupan ekonomi tanpa kelas, yang didalamnya kepemilikan sarana produksi bersifat kolektif. Tujuan itu bisa dicapai dengan menghapuskan kepemilikan pribadi dan mendistribusikan kekayaan beserta sumber-sumbernya kepada rakyat secara merata. Pandangan ini kemudian diperluas menjadi sistem nilai yang mencakup semua aspek kehidupan.

Karena adanya ide untuk mencetuskan revolusi itulah Marx menyusun suatu falsafah kehidupan untuk menopang paham sosialismenya di bidang ekonomi dan politik. Sebagaimana diketahui, sosialisme Marx memusatkan perhatian pada masalah kebendaan (materi) dan kebutuhan dasar manusia. Pandangan filosofisnya kemudian dikenal sebagai paham **materialisme historis** atau **materialisme dialektik**. Masalah moralitas kegamaan dan segala hal yang bersifat kerohanian pastinya tersingkir jauh dari paham ini.

Sebenarnya filsafat ini mulanya ditemukan oleh Hegel, yang kemudian digunakan dan dibalikkan oleh muridnya Marx menjadi materialisme dialektik. Dalam pandangan Hegel, wujud alam ini merupakan akibat dari adanya gerakan evolusi dari ide-ide yang saling bertentangan (*thesa/tesa* dan *anti-thesa/antitesa*), tetapi dalam perkembangan puncaknya kedua hal yang saling bertentangan tersebut berpadu menjadi satu (*sinthesa/sintesa*).⁷ Mas'ud an Nadwi menguraikan bahwa dalam pandangan Hegel wujud alam ini merupakan suatu akibat dari adanya gerakan evolusi ideas (gambaran-gambaran), yang proses kejadiannya ialah karena adanya daya tarik-menarik yang amat kuat, akibat adanya dua kekuatan yang saling bertentangan. Setiap benda mengandung kekuatan yang berlawanan dengan dirinya, seperti halnya adanya kekuatan positif terkandung pula di dalamnya kekuatan negatif. Akibat dari pertarungan dan tarik-menarik antara dua kekuatan tersebut, maka lahirlah kekuatan positif yang lebih efektif dibanding kekuatan sebelumnya.⁸ Demikian seterusnya historisitas perkembangan alam dan struktur sosial.

Materialisme dialektik adalah paham yang meyakini bahwa asas kehidupan sepenuhnya bersifat kebendaan. Karena itu sejarah juga berkembang dan berubah disebabkan faktor-faktor dialektik dari hal-hal yang bersifat kebendaan. Kata *dialectics* atau *dialectical* berasal dari kata Yunani '*dialeces*', yang artinya ialah mematahkan argumentasi lawan dengan menggunakan pendapat yang bertentangan. Ini dianggap sebagai cara terbaik dalam mencapai kebenaran atau hakekat dari suatu kebenaran. Menurut Marx, yang hakiki bersifat kebendaan, bukan yang bersifat kerohanian seperti ide. Pertarungan dua unsur kekuatan dalam diri benda ditafsir oleh Marx sebagai pertarungan benda untuk mempertahankan kekekalannya dalam alam.⁹

Berdasarkan paham materialisme dialektiknya, lahirlah tesisnya tentang 'pertarungan kelas' (*class struggle*) dalam masyarakat industrial di Eropa pada abad ke-19. Kaum penindas diwakili oleh pemilik modal atau kapitalis borjuis (*tesa*), sedang lawannya (*anti-tesa*) ialah kaum buruh yang disebut sebagai proletar.¹⁰ Pertempuran atau pertarungan akan terjadi jika kaum proletar mulai menyadari hak-haknya terampas, dan menyadari pula bahwa sejarah terus berkembang apabila mampu mendorong masyarakat memilih kekuatan yang mana mereka akan memihak. Kemenangan yang akan diraih oleh pemenangnya tidak lain merupakan akibat dari tatanan ekonomi yang berlaku pada masa itu. Jadi munculnya suatu masyarakat baru yang bercorak sosialis merupakan sintesa dari pertarungan kelas antara kaum kapitalis-borjuis dan proletar.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa saat ini pendidikan di Indonesia cenderung terindustrialisasi dan menjadi 'alat'. Alat bagi bagi si anak untuk memperoleh pekerjaan, alat bagi guru untuk memperoleh penghasilan, alat bagi pengelola sekolah untuk memperoleh keuntungan. Singkatnya, lembaga sekolah tak lebih dari sekedar produk kapitalisme lanjut yang berorientasi pada kepentingan pasar.

Ketika berbicara tentang pendidikan, tema-tema yang cenderung diperbincangkan adalah hal-hal yang bersifat teknis, seperti kurikulum, nilai ujian, efisiensi, daya saing, pendapatan guru dan sebagainya. Persoalan kemanusiaan baru

dibicarakan ketika semua orang telah menyadari bagaimana rendahnya produk lulusan pendidikan yang ada selama ini. Birokrat yang doyan korupsi, artis yang senang mengumbar aurat, pengusaha yang eksploitatif, buruh dan mahasiswa yang anarkis dan sebagainya harus diakui sebagai cerminan kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal menilik esensinya, pendidikan adalah usaha humanisasi, sebuah usaha kolektif di mana peserta didik dikenalkan dengan kemanusiaannya sendiri. Pendidikan adalah suatu hal yang bersangkutan-paut dengan manusia, maka tidak selayaknya pendidikan menghempaskan asas kemanusiaannya. Sistem pendidikan yang menindas dan kapitalistik diartikan sebagai pelanggeng hegemoni kaum-kaum dari kelompok sosial tertentu untuk menindas kaum-kaum dari kelompok sosial lainnya. Menindas juga dapat dipahami sebagai upaya menafikan ide-ide tentang kemanusiaan.

Pendidikan Indonesia selalu dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang sangat tidak menguntungkan pihak terdidik. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan kurikulum baru yang menurut mereka lebih bagus, lebih tepat sasaran, lebih *up-date*, lebih kebarat-baratan dan sebagainya. Namun itu semua tidak memudarkan *image*, dan bahkan semakin memperjelas, bahwa institusi pendidikan tak ubahnya seperti pencetak mesin ijazah. Dengan membayar sejumlah tarif tertentu, seseorang dengan mudah akan memperoleh gelar kesarjanaan dan ijazah tanpa melewati proses edukatif apapun. Pendidikan bukan lagi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang masih tertulis di UUD 1945, tapi justru lebih mirip 'mesin usang' yang mengeluarkan produk yang sulit diandalkan kualitasnya.

Pendidikan lebih diarahkan pada menyiapkan tenaga 'buruh' saat ini yang dibutuhkan oleh mesin-mesin dan birokrasi kapitalis. Materi ajar dijejalkan kepada peserta didik dan kesemuanya itu hanya ditujukan untuk mendapatkan kelulusan dan ijazah. Mereka tidak lagi disiapkan menjadi pemikir handal, ilmuwan dan pribadi yang memiliki integritas keilmuan dan kemanusiaan yang kuat. Dengan pendekatan kapitalistik dan pola pikir 'buruh' itu sekolah menjadi mahal, dan menikmati pendidikan yang berkualitas merupakan hal yang mustahil bagi masyarakat bawah. Stigma yang terbenam di benak para penyelenggara dan birokrat pendidikan nasional bahwa sekolah itu memang mahal adalah opini yang keliru. Malaysia, Jerman, dan bahkan Kuba sekalipun bias membuat pendidikannya sangat murah dan dapat diakses oleh sebagian besar lapisan masyarakatnya.

C. Pendidikan dengan Pendekatan Marxis-Sosialis

Dalam pandangan Marxis, pendidikan merupakan supra-struktur yang amat diperlukan dalam mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai infra-struktur pembangun masyarakat. Dalam kaitannya dengan eksistensi pendidikan dalam masyarakat, S. Nasution menjelaskan bahwa pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik di masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan untuk beralih dari golongan yang satu ke golongan yang lebih tinggi. Para ahli pendidikan banyak menaruh kepercayaan akan kemampuan pendidikan untuk memperbaiki nasib seseorang.¹¹

Sejak zaman dahulu telah terbentuk stratifikasi sosial yang ikut menentukan tingkat kesempatan pendidikan dan kemampuan mengaktualisasikan diri secara sosial. Dengan memperluas dan meratakan pendidikan diharapkan dicairkannya batas-batas antara golongan-golongan sosial. Diharapkan bahwa kesempatan belajar yang sama membuka jalan bagi setiap anak untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, tanpa mengorbankan hak-hak kemanusiaannya sendiri. Kewajiban belajar atau pendidikan universal memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sama bagi semua anak dari semua golongan sosial. Dengan demikian perbedaan golongan sosial akan dikurangi, kalaupun tidak dapat dihapuskan seluruhnya.

Pada umumnya di Negara demokrasi orang sukar menerima adanya golongan-golongan sosial dalam masyarakat. Menurut undang-undang semua warga sama, sama hak dan kewajiban serta perlakuan di hadapan undang-undang. Dalam kenyataan tak dapat disangkal adanya perbedaan sosial itu yang tampak dari sikap rakyat biasa terhadap pembesar, orang miskin terhadap orang kaya, buruh terhadap majikan, pegawai terhadap atasan. Perbedaan itu nyata dalam simbol-simbol status seperti mobil mewah, rumah mentereng, perabot lux, fasilitas hidup yang serba 'wah' dan sebagainya. Suka atau tak suka, perbedaan sosial terdapat di mana-mana sepanjang masa, walaupun sering tidak selalu mencolok.

Pendidikan bertujuan untuk membekali setiap anak agar masing-masing dapat maju dalam hidupnya mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Namun pada kenyataannya, sekolah sendiri tidak mampu meniadakan batas-batas tingkatan sosial itu karena banyaknya 'kekuatan dan daya' luar sekolah yang memelihara atau mempertajam stratifikasi sosial tersebut.¹² Sekolah sangat dipengaruhi, atau dapat dikatakan didominasi, oleh hegemoni kebijakan yang berdasar dari sistem ekonomi politik yang diterapkan oleh pemerintahan yang berkuasa. Jika ideologi Negara tersebut adalah kapitalisme yang mengedepankan individualisme, maka sistem pendidikannya pun diarahkan untuk itu. Sebaliknya, jika ideologinya adalah sebuah ideologi kolektif yang mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi atau golongan, maka pendidikannya juga akan diabdikan untuk kepentingan sosial.

Kapitalisme pendidikan memang masih menjadi realitas yang merisaukan para pemerhati pendidikan. Seperti yang disinggung Mu'arif, pendidikan nasional untuk saat ini sepertinya memang semakin jauh dari visi kerakyatan. Bahkan dengan otonomi sekolah-sekolah tinggi semakin jelas menunjukkan gejala kapitalisme pendidikan. Saat ini pendidikan dikelola dengan menggunakan manajemen bisnis yang kemudian menghasilkan biaya yang melangit. Biaya pendidikan semakin mahal, bahkan terkesan telah menjadi komoditas bisnis bagi pemilik modal (kapitalis).¹³

Kalangan praktisi pendidikan yang berada "di luar" sistem birokrasi formal mulai mencari upaya dan langkah untuk merespon persoalan pendidikan yang semakin memprihatinkan tersebut. Mereka, yang terdiri dari para pemikir, pegiat LSM, dan tokoh pendidikan yang berasal dari lembaga dan sekolah swasta, memulai suatu gerakan yang didasarkan pada paradigma radikal sebagai alternatif berpikir untuk mengkritisi pelaksanaan proyek-proyek pendidikan di tanah air. Bertolak dari

pemikiran Paulo Freire, dipandang perlu adanya penciptaan kesadaran kritis dan radikal dalam bidang pendidikan agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengkritisi adanya 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada.¹⁴ Pemikiran Marxis-Sosialis, sebagai konsepsi ideologi ilmiah anti kapitalisme, merupakan salah satu basis filosofis yang terpenting dalam membangun paradigma pendidikan radikal atau kritis.

Marxisme membangun konsep filosofisnya tentang manusia dan masyarakat dengan berangkat dari penolakannya terhadap idealisme Hegelian. Marxisme menganggap bahwa persepsi, ide, pandangan dan teori merupakan refleksi dan bayangan dari yang menyimpang dari praktik. Menurut Marx, manusia harus membuktikan kebenaran, misalnya realitas dan kekuasaan, keduniawian dari pemikirannya dalam praktik. Praktik, dalam arti keterkaitan langsung manusia dengan realitas dan alam material, adalah kriteria kebenaran, karena ia mendasari pengetahuan tentang realitas dan arena hasil dari proses kognitif direalisasikan dalam aktivitas material, obyektif manusia.¹⁵

Marx menandakan bahwa praktik adalah satu-satunya kriteria obyektif kebenaran, sejauh hal itu merepresentasikan bukan hanya mental manusia, namun juga keterkaitan manusia yang ada secara obyektif dengan dunia alam dan sosial yang melingkupi dirinya.¹⁶ Sangat jelas di sini, teori pengetahuan Marx sangat dilandasi oleh filsafat material, dengan mengingkari kebenaran-kebenaran idealistik dan supra-natural yang tidak dapat dijangkau oleh daya indera manusia sebagai sarana praktik, dan pada sisi lain menerima objek materi dan pemahaman obyektif manusia terhadap materi tersebut sebagai dasar kebenaran mutlak. Dogma dan kebenaran agama yang bersumber dari wahyu (*revelation*) tertolak mentah-mentah dari paham Marxisme.

Untuk memahami metode pendidikan Marxis yang dianggap bervisi pembebasan, sangat tidak mungkin meninggalkan pandangan Marx yang menekankan bahwa pengetahuan dan praktik tidak boleh dipisahkan. Inilah pandangan penting dalam filsafat Marx, yang kemudian baru dikembangkan oleh para filosof pendidikan seperti Paulo Freire di Brazil, yang tentu saja sekarang menjadi filosof pendidikan untuk pembebasan di banyak negara.

Marxlah yang pertama-tama berani mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang obyektif bukanlah ilmu yang terpisah dari akar material sejarah serta dari kelas sosial. Ilmu yang obyektif dan progresif bukan berarti adalah ilmu yang tidak berpihak pada kelas. Justru yang berpihaklah yang obyektif, yaitu berpihak pada kelas tertindas atau orang miskin. Sehingga bagi Marx, teori yang berlandaskan pada sudut pandang kelas pekerjalah yang secara obyektif mampu memahami realitas sosial. Rakyat pekerja adalah yang berpraktik, yang berhadapan dengan alam secara langsung dan sudah seringkali melakukannya.¹⁷

Akar-akar historisnya adalah bahwa orang miskin (kelas pekerja;proletar) tidak memiliki tendensi apapun untuk memalsu realitas karena mereka tidak butuh selubung apa pun untuk menyembunyikan realitas ketertindasan. Berbeda dengan kelas penghisap yang membutuhkan selubung ideologis untuk menyembunyikan dan

menutup-nutupi penghisapan yang dibuatnya. Pengetahuan dan filsafat yang dihasilkannya adalah subyektif, sehingga praktis bukan pengetahuan, tetapi alat untuk mewujudkan kehendak subyektifnya.

Dalam memahami hakikat manusia, Marx tidak percaya, sebagaimana banyak sosiolog dan psikolog kontemporer, dengan pandangan yang mengatakan bahwa watak manusia itu tidak ada; bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong (baca: tabula rasa) dan kebudayaan atau lingkunganlah yang akan mengisinya. Berkebalikan dengan relativisme sosiologis, Marx melontarkan ide bahwa manusia qua manusia adalah entitas yang dapat dikenali dan diketahui, bukan hanya secara biologis, anatomis dan fisik, tetapi juga psikologis.¹⁸

Jadi, meski pun Marx banyak bersandar pada paham materialisme historisnya yang lebih menekankan aspek material, namun pada persoalan manusia ia mempercayai adanya aspek non-fisik yang menentukan esensi kemanusiaannya. Aspek inilah yang nantinya mesti ditemukan dan diaktualisasikan dari ketertindasan dan ketidaksadaran akibat perlakuan subordinatif menuju humanisasi dan pembebasan manusia. Di sini Marx tampaknya sangat bergantung pada proses pendidikan sebagai bagian dari supra-struktur pembangun pilar masyarakat ideal.

Kemerdekaan dan kebebasan, bagi Marx, didasarkan pada perilaku mencipta diri. Menurutnyanya:

“Seorang manusia tidak akan menganggap dirinya merdeka jika dia tidak menjadi majikan untuk dirinya sendiri. Dan dia hanya dapat menjadi majikan untuk dirinya sendiri ketika meminjam eksistensinya untuk dirinya sendiri... Manusia itu merdeka hanya”...jika dia menegaskan individualitasnya sebagai seorang manusia yang total di setiap hubungannya dengan dunia, melihat, mendengar, membau, mengecap, merasa, berpikir, berkehendak, mencintai – pendeknya, jika dia menegaskan dan mengungkapkan semua organ individualitasnya,” jika dia tidak hanya bebas dari (*free from*) tetapi juga bebas untuk (*free to*)”¹⁹

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Marxisme mengembangkan pemikiran ekonomi-sosialnya dari teori materialisme historis, yang ujung-ujungnya menyimpulkan adanya dialektika yang terus-menerus pada realitas alam dan kehidupan sosial manusia. Teori ini juga yang pada gilirannya menjadi dasar filosofis perjuangan Marxis dalam meruntuhkan kapitalisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas, egalitarian dan jauh dari adanya dominasi dan hegemoni dalam struktur masyarakat. Kapitalisme telah menciptakan ketertindasan kaum buruh (pekerja) dengan menguntungkan pihak kapital. Dan yang tak kalah fatalnya adalah terciptanya alienasi (keterasingan) yang diakibatkan pola hubungan produksi kapitalistik.

Marxisme memandang, sejarah manusia adalah sejarah perkembangan manusia yang terus meningkat, dan pada saat yang bersamaan juga memperparah alienasi. Konsep Marx tentang sosialisme adalah pembebasan dari alienasi, mengembalikan manusia menjadi dirinya sendiri, dengan kata lain pewujudan diri. Hal ini sejalan

dengan tujuan universal dari pendidikan, jika tidak dapat dikatakan sebagai konsep pendidikan, bahwa Marxisme sangat menekankan pengembangan dan perbaikan kualitas kemanusiaan, serta membebaskan esensi manusia dari keterbelengguan sebelum melangkah kepada suatu revolusi sosial.

Alienasi (*pengasingan, estrangement*), menurut Marx, bukan hanya berarti bahwa manusia tidak mengalami dirinya sebagai pelaku ketika menguasai dunia, tetapi juga berarti bahwa dunia (alam, benda-benda, dan manusia sendiri) tetap asing bagi dirinya. Esensi dari apa yang disebut oleh para nabi sebagai “syirik” bukanlah bahwa manusia menyembah banyak tuhan, meskipun sebenarnya hanya ada satu tuhan. Syirik itu berarti pemujaan pada karya tangan manusia sendiri, yakni barang-barang; manusia tunduk dan menyembah barang-barang; menyembah apa yang diciptakannya sendiri.²⁰

Makna alienasi kerja, menurut Marx, adalah kerja eksternal bagi pekerja, bahwa kerja bukan bagian dari wataknya, dan bahwa sebagai akibatnya, dia tidak bias memenuhi dirinya dalam kerja. Kerja seperti itu tidak berdasarkan kebebasannya sebagai spesies, tetapi telah tereduksi demi aktivitas yang tertukar dengan uang. Pekerja tidak menjadi subyek atas dunianya sendiri; bukan untuk pemenuhan dan ungkapan individualnya yang sejati, tetapi untuk wilayah eksternalnya, untuk kapitalis. Aktivitas yang dari (dan demi) dirinya sendiri adalah aktivitas yang teralienasi.²¹

Karena Marxisme adalah teori kritik yang menyibak adanya ideologi penindasan dalam struktur masyarakat berkelas yang menindas, makanya cita-cita pendidikan Marxis bertujuan untuk mewujudkan kembali kesadaran manusia agar ia mampu hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaannya. Pertama-tama, pendidikan harus dilakukan dengan penyadaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan-hambatan material yang ada. Selanjutnya, pendidikan secara menyeluruh harus digunakan untuk menciptakan tatanan yang sesuai bagi hakikat manusia, yaitu tatanan di mana kontradiksi berupa hubungan produksi yang eksploitatif (kapitalisme) digantikan dengan hubungan produksi yang setara, yang seringkali disebut Marx dan para pengikutnya sebagai sosialisme.²²

Sosialisme menghendaki adanya sosialisasi alat-alat produksi dan sumber-sumber ekonomi, dengan menghilangkan kepemilikan pribadi (*private property*), terutama bagi asset-aset vital dan menentukan hajat hidup orang banyak. Dalam sosialisme diniscayakan adanya control yang demokratis terhadap sumber-sumber ekonomi, dan tentu saja terhadap sumber-sumber kekuasaan politik karena politik biasanya mengatur bagaimana kebijakan ekonomi suatu masyarakat. Jadi secara politik, sosialisme juga menginginkan adanya partisipasi politik, kesadaran politik dan kebijakan yang didasarkan pada kehendak mayoritas akan adanya penataan ekonomi yang adil.²³

Pendidikan harus diberikan secara massal, karena dengan adanya massalisasi pendidikan, upaya menciptakan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan yang meluas juga dimungkinkan. Jadi, pengetahuan dan teknologi juga harus

disosialisasikan bersamaan asset-aset produksi.²⁴ Dalam masyarakat berkelas (feodalisme dan kapitalisme), hanya sedikit orang yang berwawasan dan terampil, yaitu kalangan penindas dan penguasa, sehingga pos-pos ekonomi dan kekuasaan pun dipegang oleh mereka dan untuk mereka sendiri.

Bagi Marx, tujuan sosialisme adalah emansipasi manusia, dan emansipasi manusia sama dengan perwujudan diri dalam proses hubungan dan kesatuan yang produktif dengan manusia dan alam. Tujuan sosialisme adalah pengembangan kepribadian individu. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Marx menuding bahwa dalam masyarakat borjuis, modal itu bebas dan memiliki individualitas, sedang manusia hidup bergantung dan tidak memiliki individualitas. Dalam mendefinisikan buruh (*labour*), ia menyatakan bahwa buruh adalah sebuah proses di mana manusia dan alam berpartisipasi, dan di mana manusia berkehendak sendiri memulai, mengatur dan mengendalikan hubungan material antara dirinya dan alam.²⁵

Sosialisme adalah sebuah masyarakat yang memberi ruang bagi aktualisasi manusia, dengan cara mengatasi alienasinya. Untuk menciptakan dan mempertahankan sosialisme, sebagai jalan pembebasan manusia, pendidikan harus demokratis, menciptakan kondisi anak-anak didik yang benar-benar bebas, rasional, aktif dan independen.²⁶ Dengan demikian, *out put* dari pendidikan Marxis ini mengekspresikan kemanusiaannya yang sejati dalam aktivitas-aktivitas produksinya, tidak meleburkan dirinya dalam keterasingan, dan mewujudkan pola hubungan yang setara.

Marx mengkritik keras institusi pendidikan yang dan media hiburan yang diciptakan pemerintahan kapitalistik. Institusi pendidikan, menurut Marx, hanyalah sebagai suatu pelayanan terhadap keperluan-keperluan ekonomi, dengan memberikan indoktrinasi kepada individu-individu tentang norma-norma dan nilai-nilai yang mendukung *status quo*, dan dengan melatih mereka menduduki posisi-posisi pekerjaan dalam sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Berbagai bentuk industri hiburan dipandang juga sebagai suatu usaha untuk mengalihkan atau menenangkan orang.²⁷

Prinsip Marxisme yang dikaitkan dengan masalah pendidikan akan menunjukkan bahwa pendidikan sebagai proses historis dalam kehidupan manusia ditentukan oleh perkembangan masyarakat yang, tentu saja, didasari oleh kondisi material-ekonomis yang berkembang. Karena Marx menempatkan pendidikan pada wilayah struktur atas (suprastruktur) yang disangga oleh ekonomi sebagai fondasi perkembangan masyarakat, maka pendidikan juga adalah media sosialisasi pandangan hidup dan kecakapan yang harus diterima pada masyarakat (terutama anak-anak).²⁸

Satu hal yang menarik dari pemikiran Marx adalah ketidakberpihakannya pada bentuk pendidikan yang legal-formalistik, dengan mengurung peserta didik di balik tembok kokoh sekolah, tanpa mendorong mereka untuk keluar merasakan realitas alam di sekelilingnya. Dalam hal ini, perjalanan sejarah masyarakat telah mencatat perkembangan yang terus berubah, yang akhirnya menciptakan lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan struktur ekonomi, sosial dan politik yang berkembang. Lembaga pendidikan, dalam berbagai proses sejarah, juga mengalami perubahan.

Dalam masyarakat lama, pendidikan terjadi tanpa adanya sekolah, tanpa adanya proses formal-legal, tanpa birokratisme dalam proses mendapatkan atau memberikan pengetahuan. *Alam adalah guru, alam adalah sekolah.*²⁹

Marx sangat yakin bahwa basis bagi pendidikan adalah perkembangan ekonomi, yakni cara manusia menghadapi alam untuk memenuhi kehidupan dan mengembangkannya. Berbagai kontradiksi alam yang dijumpai dengan berbagai macam kondisinya adalah guru. Manusia belajar dari alam, dari pengalaman yang dirasakannya.³⁰ Pada intinya, Marxisme sangat berambisi menciptakan tata kehidupan manusia yang apa adanya, tanpa adanya struktur kelas sosial yang eksploitatif, melalui pendidikan yang juga manusiawi, alami, demokratis, tidak eksklusif, egaliter dan bertujuan mengembalikan esensi kemanusiaan sebagaimana *fitrah*-nya.

D. Kesimpulan

Dari uraian tentang pendidikan dalam pendekatan Marxis-Sosialis, yang pada substansinya adalah refleksi dan respon kritis terhadap pola dan filosofi pendidikan kapitalistik yang berkembang sampai sekarang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Marxisme-Sosialisme adalah teori yang dirancang untuk membangun masyarakat yang baik. Suatu masyarakat yang meniadakan penindasan kelas yang satu terhadap kelas yang lain, adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengekspresikan kemanusiaannya dalam setiap aktivitas produksi (ekonomi) sebagai basis kehidupan manusia. Marxisme menolak keras pola-pola pendidikan yang hanya menyiapkan peserta untuk menjadi 'buruh' yang nantinya akan diperas oleh mesin-mesin produksi kapitalis.
- b. Dalam pandangan Marxisme, Praktik, dalam arti keterkaitan langsung manusia dengan realitas dan alam material, adalah kriteria kebenaran, karena ia mendasari pengetahuan tentang realitas dan arena hasil dari proses kognitif direalisasikan dalam aktivitas material, obyektif manusia. Praktik adalah satu-satunya kriteria obyektif kebenaran, sejauh hal itu merepresentasikan bukan hanya mental manusia, namun juga keterkaitan manusia yang ada secara obyektif dengan dunia alam dan sosial yang melingkupi dirinya.
- c. Pendidikan dalam pendekatan Marxis harus dilakukan dengan kesadaran dan mendorong manusia mengenali dan melawan hambatan-hambatan material yang ada. Selanjutnya, pendidikan secara menyeluruh harus digunakan untuk menciptakan tatanan yang sesuai bagi hakikat manusia, yaitu tatanan di mana kontradiksi berupa hubungan produksi yang eksploitatif (kapitalisme) digantikan dengan hubungan produksi yang setara. Karena itu, pendidikan harus demokratis, menciptakan kondisi anak-anak didik yang benar-benar bebas, rasional, aktif dan independen.

Endotes

- ¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 306-307.
- ² C. Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori* (Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 126
- ³ Agus Salim, *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), h. 13.
- ⁴ Ralqis, *Karl Heinrich Marx*, <http://duniaremaj.org/filsafat-f37/karl-heinrich-marx-tl20.htm>, diakses tanggal 12 Mei 2010, h. 3.
- ⁵ PIP Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 77
- ⁶ Dalam teori materialism historisnya, Marx mengemukakan cara-cara masyarakat dalam mengorganisir produksi yang disebut mode produksi. Kelima mode produksi tersebut adalah komunis primitif, kuno, feodal, kapitalis dan komunis. Pada masyarakat non komunis, khususnya kapital, muncul karakter kelas yang baru. Tenaga kerja dari suatu kelas pekerja yang tak memiliki tanah, diistilahkan oleh Marx dengan kaum *proletar*, dapat dibeli oleh kelas majikan yang memiliki segalanya, yang disebut kaum *borjuis*. *Ibid.*, h. 82.
- ⁷ Aby Setyo Nugroho, *Islam, Marxisme dan Persoalan Sosialisme di Indonesia*, <http://www.pmii-ciputat.or.id/sosial-politik/180-aby-setyo-nugroho.html>. diakses tanggal 10 Mei 2010
- ⁸ Mas'ud An Nadwi, *Al-Isytirakiyah wa al-Islam*, diterjemah oleh Shuhaib Hasan & Abdul Ghaffar Hasan, *Islam dan Sosialisme* (Bandung: Penerbit Risalah, 1983), h. 46.
- ⁹ Nugroho, *op.cit.*
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ S. Nasution, *Sosiologi Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 38
- ¹² *Ibid.*, h. 40
- ¹³ Muarif. *Wacana Pendidikan Kritis* (Cet. I; Jogyakarta: IRCiSoD, 2005), h. 115.
- ¹⁴ Paulo Freire membagi ideologi pendidikan dalam tiga kerangka yang didasarkan pada kesadaran ideologi masyarakat. Pemikirannya bertolak tentang kesadaran manusia yang dibagi dalam tiga kerangka kesadaran ideologis: 1) Kesadaran Magis (*magical consciousness*) yaitu kesadaran masyarakat yang paling rendah, karena mereka tidak mampu melihat perkaitan antara faktor yang satu dengan yang lain. 2) Kasadaran Naif (*naival consciousness*) yang bertolak dari asumsi bahwa aspek manusia menjadi akar penyebab dari masalah di masyarakat. Kesadaran naf ini selalu melihat upaya peningkatan SDM sebagai man power development, sebagai pemicu utama proses perubahan sosial. 3) Kesadaran Kritis (*critical consciousness*) yaitu kesadaran yang menitikberatkan pada aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Lihat Agus Salim, *op.cit.*, h. 290-291
- ¹⁵ Nezar Patria dan Andi Arif, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), h. 76.
- ¹⁶ *Ibid.* Marx dan Engels menegaskan bahwa aktivitas praktis manusia sehari-hari dalam produksi, yang telah menciptakan basis material kehidupan masyarakat, juga mempunyai arti teoritis

yang besar bagi pengenalan. Mereka menetapkan bahwa "segikehidupan, segi praktik, harus diutamakan dan fundamental dalam teori pengetahuan. Berbeda dengan materialism pra-Marxis, Marxisme memasukkan praktik ke dalam teori pengetahuan, memandang praktik sebagai basis dan tujuan dari proses pengenalan dan sebagai ukuran (standar) keterpercayaan pengetahuan. *Teori Pengetahuan Marxis*, <http://Sayyidmadany.multiply.com/reviews/2>. diakses tanggal 13 Mei 2010.

¹⁷ Nurani Soyomukti, *Metode Pendidikan Marxis Sosialis* (Cet. I; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2008), h. 110.

¹⁸ Bagi Spinoza, Goethe, Hegel serta Marx, manusia akan hidup hanya jika dia produktif, menguasai dunia di luar dirinya dengan tindakan untuk mengekspresikan kekuasaan manusiawinya yang khusus dan menguasai dunia dengan kekuasaannya tersebut. Manusia yang tidak produktif adalah manusia yang reseptif dan pasif; dia tidak ada dan mati. Dalam proses produksi ini, manusia mewujudkan esensinya sendiri. Pada kondisi itu manusia kembali kepada esensinya, yang dalam bahasa teologis dia kembali kepada Tuhan. Lihat Erick Fromm, *Marx's Concept of Man*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, *Konsep Manusia menurut Marx* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 33.

¹⁹ *Ibid.*, h. 48

²⁰ *Ibid.*, h. 59.

²¹ Soyomukti, *op. cit.*, h. 71.

²² *Ibid.*, h. 101.

²³ *Ibid.*, h. 103.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Fromm, *op. cit.*, h. 49-51.

²⁶ Soyomukti, *op. cit.*, h. 103.

²⁷ Syukron Kamil, *Pemikiran Karl Marx; Agama sebagai Alienasi Masyarakat Industri, Suatu Apresiasi dan Kritik*, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 1 No. 2 Januari 2002, h. 125

²⁸ Soyomukti, *op.cit.*, h. 74-75.

²⁹ *Ibid.*, h. 85

³⁰ *Ibid.*, h. 86

Daftar Pustaka

- Fromm, Erick, *Marx's Concept of Man*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, *Konsep Manusia menurut Marx*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Halim, Paisal, *Biografi Karl Marx*, <http://dokterpaisal.wordpress.com>, diakses tanggal 10 Mei 2010.
- Hasan, Ghaffar, *Islam dan Sosialisme*, Bandung: Penerbit Risalah, 1983

-
- Jones, PIP, *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Kamil, Syukron *Pemikiran Karl Marx; Agama sebagai Alienasi Masyarakat Industri, Suatu Apresiasi dan Kritik*, Jurnal Universitas Paramadina, Vol. 1 No. 2 Januari 2002
- Muarif. *Wacana Pendidikan Kritis*, Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2005
- Nadwi, Mas'ud, *Al-Isytirakiyah wa al-Islam*, diterjemah oleh Shuhaib Hasan & Abdul Nasution, S., *Sosiologi Pendidikan*, Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Nugroho, Aby Setyo, *Islam, Marxisme dan Persoalan Sosialisme di Indonesia*, <http://www.pmi-ciputat.or.id/sosial-politik/180-aby-setyo-nugroho.html>. diakses tanggal 10 Mei 2010
- Patria, Nezar dan Andi Arif, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni* Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999
- Ralqis, *Karl Heinrich Marx*, <http://duniaremaja.org/filsafat-f37/karl-heinrich-marx-tl20.htm>, diakses tanggal 12 Mei 2010
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Salim, Agus, *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia* Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002
- Teori Pengetahuan Marxis*, <http://Sayyidmadany.multiply.com/reviews/2>. diakses tanggal 13 Mei 2010.
- Soyomukti, Nurani, *Metode Pendidikan Marxis Sosialis*, Cet. I; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2008.
- Wulansari, C. Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Wikipedia Ensinklopedia Bebas, *Karl Marx*, <http://id.wikipedia.org/wiki/KarlMarx>, diakses tanggal 10 Mei 2010